

# **ANALISIS WACANA KRITIS TEKS BERITA JAWA POS TERKAIT PENETAPAN DAHLAN ISKAN SEBAGAI TERSANGKA KASUS GARDU INDUK PLN DAN MOBIL LISTRIK (SEBUAH ANALISIS WACANA KRITIS)**

*CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF TEXT RELATED NEWS JAWA  
POS DESIGNATION AS A SUSPECT CASE, DAHLAN ISKAN,, PLN  
SUBSTATION HOME AND CAR ELECTRIC (AN ANALYSIS OF  
CRITICAL DISCOURSE)*

**Ali Kusno**

Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur  
Jalan Batu Cermin No. 25 RT 4 Sempaja Utara Samarinda Utara 75119  
Telepon: (0541) 250256 alikusnolambung@gmail.com

Tanggal naskah masuk 11 Agustus 2015  
Tanggal akhir penyuntingan 10 Desember 2015

*Abstract :*

*Dahlan Iskan, usually called DI, determined the suspect by the Jakarta High Court in the case of PLN substation and electric cars. DI as an opportunity to direct the owner of Jawa Pos Group in the news related to him. Or it could be without being directed, by itself Jawa Pos down the news that defending DI. This study aims to describe the structure of the text, discourse practice, and ideology news Jawa Pos. This study uses descriptive qualitative critical discourse analysis approach Fairclough models. This research data in the form of documents. Data source document that is news in www.jawapos.com. Based on textual analysis (micro analysis), analysis of discourse practice and socio-cultural dimensions of practice (macro) indicates that Jawa Pos forming diverse ideologies: DI innocent; DI measures taken as a breakthrough over the various problems facing the nation; DI policy conducted entirely in the interests of society; DI own wealth so it is not possible corruption; Errors that occur a former subordinate fault DI; DI being a knight to take over responsibility.*

*Keywords: news, Dahlan Iskan, suspect, critical discourse analysis*

*Abstrak :*

*Dahlan Iskan, biasa disapa DI, ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik. DI sebagai pemilik berpeluang mengarahkan Jawa Pos Group dalam pemberitaan terkait dirinya. Atau bisa juga tanpa diarahkan, dengan sendirinya Jawa Pos menurunkan berita yang membela DI. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur teks, praktik wacana, dan ideologi pemberitaan Jawa Pos. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough. Data penelitian ini berupa dokumen. Sumber data dokumen yakni berita-berita di www.jawapos.com. Berdasarkan analisis tekstual (analisis mikro), analisis praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya (makro) menunjukkan bahwa Jawa Pos membentuk beragam ideologi: DI tidak bersalah; kebijakan yang diambil DI sebagai sebuah terobosan atas berbagai persoalan bangsa; Kebijakan yang dilakukan DI sepenuhnya demi kepentingan masyarakat; DI sudah memiliki harta*

*kekayaan sehingga tidak mungkin korupsi; Kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan mantan bawahan DI; DI bersikap kesatria mengambil alih tanggung jawab.*

*Kata-kata kunci: berita, Dahlan Iskan, tersangka, Analisis wacana kritis*

## A. PENDAHULUAN

Dahlan Iskan pada tanggal 5 Juni 2015 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penetapan tersangka tersebut menjadi berita besar. Media massa nasional hampir semua menjadikannya sebagai *headline*. Penetapan tersangka tersebut bertolak belakang dengan citra Dahlan Iskan selama menjabat Dirut PLN maupun Menteri BUMN. Masyarakat Indonesia selama ini mengenal sosok Dahlan Iskan bersih dari korupsi.

Kusno (*Jawa Pos*, 18 Juni 2015) berpendapat penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka juga menimbulkan kekhawatiran Dahlan Iskan akan mengarahkan *Jawa Pos Group* membentuk opini di masyarakat bahwa 'Dahlan Iskan tidak bersalah'. Sangat memungkinkan bagi Dahlan Iskan untuk memberikan klarifikasi versinya. Namun, Dahlan Iskan tidak ingin hal itu terjadi. Dahlan tidak ingin menjerumuskan *Jawa Pos Group*.

Lebih lanjut Kusno (*Jawa Pos*, 18 Juni 2015) menyampaikan bahwa Dahlan belajar dari dunia pertelevisian. Beberapa stasiun televisi berafiliasi dengan partai politik. Suguhan tontonannya pun ikut dipolitisasi. Fakta media massa sebagai salah satu sarana yang banyak digunakan untuk mengakses informasi tidak terbantahkan. Media massa berpotensi memproduksi, menyebarluaskan, dan menentukan makna sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa dapat dimaknai positif maupun negatif dengan giringan media massa. Kelebihan media massa tersebut memang rentan disalahgunakan. Media massa dapat dimanfaatkan sebagai sarana memengaruhi masyarakat. Media massa dapat dimanfaatkan untuk membentuk opini masyarakat. Bila media massa dalam cengkeraman penguasa, fungsi kontrol pun hilang.

Thornborrow (2006: 82) berpendapat salah satu aspek penting dari potensi

kekuasaan media, jika dilihat dari sudut pandang linguistik, adalah cara media memberitakan orang atau kejadian. Bentuk linguistik tentu bisa memengaruhi nuansa dan makna yang ditimbulkan. Dua artikel dari media yang berbeda cenderung menggunakan bentuk linguistik yang juga berbeda. Meski kejadian atau permasalahan sama. Meskipun sumber beritanya sama. Bila bentuk linguistik berbeda, penafsiran pun bisa berbeda.

Oleh karena itu sangat menarik untuk mencermati perkembangan pemberitaan yang diturunkan oleh *Jawa Pos* terkait perkara yang menyangkut Dahlan Iskan. Fakta *Jawa Pos* dimiliki Dahlan Iskan tidak dapat dilupakan apalagi diabaikan. Independensi pemberitaan *Jawa Pos* dalam menyajikan berita kasus Dahlan Iskan sangat dibutuhkan. Namun demikian, sangat sulit melepaskan stigma *Jawa Pos* tersebut. Berita yang diturunkan kemungkinan menjadi tidak berimbang.

Penelitian ini sangat menarik untuk menganalisis pemberitaan *Jawa Pos* terkait kasus yang membelit Dahlan Iskan. Independen tidaknya berita yang diturunkan *Jawa Pos* dapat terlihat dari pilihan linguistik yang digunakan. Penelitian ini menganalisis berita-berita terkait penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi Gardu Induk dan mobil listrik. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan struktur teks dalam teks berita *Jawa Pos* terkait penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus gardu induk PLN dan mobil listrik, 2) mendeskripsikan praktik wacana dalam teks berita *Jawa Pos* terkait penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus gardu induk PLN dan mobil listrik, 3) mengungkap ideologi yang ingin dibangun *Jawa Pos* terkait penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus gardu induk PLN dan mobil listrik.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Bahasa dan Media

Bahasa dan media memiliki keterkaitan erat. Salah satu perkembangan bahasa didukung peran media massa. Sedangkan perkembangan media massa tidak lepas dari perkembangan bahasa. Menurut Thornborrow (2006: 78) media massa adalah salah satu cara yang paling banyak kita gunakan untuk mengakses informasi tentang dunia sekitar kita, dan sekaligus merupakan sumber dari sebagian besar kegiatan hiburan kita. Oleh karena itu, media menjadi tempat yang sangat berpotensi untuk memproduksi dan menyebarkan makna sosial, atau dengan kata lain, media berperan besar dalam menentukan makna dari kejadian-kejadian yang terjadi di dunia untuk budaya, masyarakat, atau kelompok sosial tertentu.

Peran besar media massa dengan kelebihan memproduksi dan menyebarkan makna sosial tersebut menjadikan media massa sangat memungkinkan dimanfaatkan pihak berkuasa. Menurut Thornborrow (2006: 82) aspek yang paling menarik dan paling penting dari potensi kekuasaan media jika dilihat dari sudut pandang linguistik adalah cara media memberitakan orang dan kejadian. Level dari penggunaan bahasa tersebut disebut representasi bahasa. Beberapa struktur linguistik bisa membentuk ideologi yang beragam. Hal itu menimbulkan berbagai versi dan pandangan yang berbeda dari satu kejadian yang sama.

Menurut Fairclough dalam Jorgensen dan Philips (Ahmadi F., 2015: 255) ideologi sebagai konstruksi makna yang memberikan kontribusi bagi pemroduksian, pereproduksian, dan transformasi hubungan-hubungan dominasi. Hal seperti itu sangat tampak dalam dunia media di Indonesia saat ini. Sebagai contoh, berdasarkan hasil penelitian Umar (2014) dalam *Analisis Wacana Kritis Teks Berita MetroTV dan tvOne mengenai 'Luapan Lumpur Sidoarjo'* menyimpulkan bahwa struktur teks MetroTV tidak hanya berisi pemaparan peristiwa, namun juga memberi pemaparan hal-hal negatif yang mengangkat hal tidak baik (buruk) dari PT Lapindo

Brantas. Struktur teks tvOne tidak hanya berisi pemaparan informasi sebagaimana lazimnya teks berita, namun juga memberi nuansa argumentasi untuk teks berita dengan tujuan menetralkan isu-isu yang negatif. Selanjutnya, Ideologi MetroTV adalah pencitraan negatif dengan menyerang, sementara ideologi tvOne adalah pencitraan positif dengan membela diri dan menentralkan isu-isu negatif pihak lain. Strategi MetroTV adalah Menguatkan hal negatif dari orang lain dan Mengurangi hal positif dari orang lain. Strategi tvOne adalah Menguatkan hal positif dari diri kita dan Mengurangi hal negatif dari diri kita.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa media di Indonesia sangat rentan dimanfaatkan kepentingan pemilik media maupun pihak lain yang memiliki kekuasaan dan kekuatan finansial. Kondisi tersebut tentunya berdampak tidak baik bagi masyarakat karena tidak mendapatkan informasi sesuai dengan faktanya.

### 2. Berita

Konten media yang sering dititipi kepentingan lain adalah berita. Baik media masa cetak maupun elektronik, kandungan berita yang disampaikan akan sangat berpengaruh cara pandang penonton / pembaca. William S. Maulsby (Sumadiria, 2005: 64) menegaskan, berita bisa didefinisikan sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menari perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita itu. Sebuah berita harus disampaikan dengan fakta dan kebenaran.

Menurut Sumadiria (2005: 68), dalam dunia jurnalistik, berita berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu *elemtary*, *intermediate*, *advance*. Salah satu jenis berita dari *intermediate* adalah berita interpretatif (*interpretatif news report*). *Interpretative report* lebih dari sekadar *straight news* dan *depth news*. Berita interpretatif biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus

laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini (Sumadiria, 2005: 70).

### 3. Analisis Wacana Kritis

Teks berits termasuk dalam sebuah wacana. Menurut Purbani (2009) istilah wacana (*E= discourse, L= discursus = running to and from* atau *I = diskursus*) memiliki pengertian yang beragam tergantung pada konteks apa yang tengah digunakan untuk memperbincangkannya. Secara umum wacana dimengerti sebagai pernyataan-pernyataan. Dalam ranah linguisitik, wacana dipahami sebagai unit kebahasaan yang lebih besar daripada kata atau kalimat, yang dapat melibatkan satu atau lebih orang. Jadi sebuah pidato, dialog, polemik, perdebatan, percakapan atau perbincangan dapat dikategorisasikan sebagai sebuah wacana.

Crystal dan Cook dalam Nunan (Purbani, 2009) mendefinisikan wacana sebagai unit bahasa lebih besar daripada kalimat, sering berupa satuan yang runtut/koheren dan memiliki tujuan dan konteks tertentu, seperti ceramah agama, argumen, lelucon atau cerita. Nunan melihat unsur-unsur keruntutan dan koherensi sebagai hal yang penting untuk menilai sebuah wacana. Sedangkan, Lubis (Purbani, 2009) mendefinisikan wacana sebagai 'kumpulan pernyataan-pernyataan yang ditulis atau diucapkan atau dikomunikasikan dengan menggunakan tanda-tanda.

Istilah wacana yang digunakan dalam *Critical Discourse Analysis* (CDA) yang dikembangkan para ahli linguistik sosial seperti Norman Fairclough, Teun van Dijk, Ruth Wodak memiliki pemahaman yang berbeda dari pemahaman di atas. Dalam konteks ini wacana dimaknai sebagai pernyataan-pernyataan yang tidak hanya mencerminkan atau merepresentasikan, tetapi juga mengkonstruksi dan membentuk entitas dan relasi sosial. Pemahaman wacana dalam CDA ini telah mendapat pengaruh dari teori wacana Foucault sehingga CDA juga berkembang sebagai suatu analisis yang melihat hal-hal yang meretas batas hal-hal

yang tidak dilihat oleh analisis wacana biasa (Purbani, 2009).

Lihat pernyataan Eagleton dalam *Discourse* yang ditulis oleh Sara Mills, 1997 juga Sara Mills dalam *Discourse*, 2004 (Purbani, 2009) yang menyatakan bahwa:

*Not all versions of discourse analysis would share this concern with ideology, but it follows from the post-structuralist understanding of the constructive power of language that discourses or 'discursive practices' (practices arising from particular discursive representations) have political effects, and serve to produce and distribute power in particular ways (see, for instance, Weedon, 1987). This is not to imagine that some discourses are ideological, while others are true, or to accept the idea that some people are victims of false consciousness. Rather it is an important reminder to attend to the power relations and political effects of discourses both within and beyond the interview setting.*

Teun Van Dijk (Purbani, 2009) memberi definisi CDA sebagai berikut,

*Critical discourse analysis (CDA) is a type of discourse analytical research that primarily studies the way social power abuse, dominance, and inequality are enacted, reproduced, and resisted by text and talk in the social and political context. With such dissident research, critical discourse analysts take explicit position, and thus want to understand, expose, and ultimately resist social inequality.*

Dari paparan tersebut tampak bahwa agenda utama CDA adalah mengungkap bagaimana kekuasaan, dominasi dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis.

Analisis wacana kritis Model Fairclough, menempatkan wacana atau penggunaan bahasa sebagai praktik sosial; wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah

peristiwa diskursif tertentu; wacana yang dihasilkan berbentuk sebuah genre tertentu (Titscher et. al. dalam Ahmadi F., 2015: 255).

Analisis Wacana Kritis model Fairclough dikenal dengan sebutan analisis tiga dimensi. Analisis tiga dimensi ini ialah analisis tekstual (level mikro) adalah analisis deskriptif terhadap dimensi teks; 2) analisis praktik wacana (level meso) adalah analisis interpretatif terhadap pemroduksian, penyebaran, dan pengonsumsi wacana, termasuk intertekstualitas dan interdiskursivitas; 3) analisis sosiokultural (level makro) adalah analisis eksplanatif terhadap konteks sosiokultural yang melatarbelakangi kemunculan sebuah wacana (Fairclough dalam Ahmadi F., 2015: 255).

### C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan tentang sifat individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 1994: 6). Analisis kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan kerangka teori analisis wacana kritis model Fairclough (Ahmadi F., 2014: 255).

Objek penelitian ini adalah berita-berita yang dimuat di *Jawa Pos* terkait penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen berita-berita di *Jawa Pos* yang dimuat di [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com), yang berjudul 'Cegah Kriminalisasi Pejabat, Presiden Lindungi Penanggung Jawab Proyek'; 'Dahlan: Saya Ambil Tanggung Jawab Ini. Sembilan Gardu Induk Masih Dicek, Sudah Jadi Tersangka'; 'Kontrak Gardu Induk Diteken setelah Dahlan Bukan KPA Diperiksa 9 Jam, Jawab 79 Pertanyaan'; 'Mobil Listrik APEC Pakai Dana Sponsorship BUMN, Penjelasan Dahlan kepada Kejagung'; dan 'Persoalkan Status Tersangka, Dahlan Ajukan Praperadilan'. Sedangkan teknik analisa data

menggunakan model interaktif, seperti yang dikemukakan Miles & Huberman (2007:19-20), yang terdiri atas tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Aktivitas ketiga komponen itu dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.

### D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus Gardu Induk dan Mobil Listrik oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, memberikan pengaruh pada pemberitaan yang diturunkan oleh *Jawa Pos*. Latar belakang Dahlan Iskan sebagai Pemimpin redaksi dan CEO *Jawa Pos*, memberikan pengaruh terhadap independensi pemberitaan yang diturunkan *Jawa Pos*. Fakta menunjukkan bahwa secara kuantitas pemberitaan tentang penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka di *Jawa Pos* terbilang sedikit dibandingkan dengan media lain. Selain itu, secara kualitas sangat menarik untuk mencermati terkait isi pemberitaan tersebut. Berikut ini analisis wacana kritis terkait pemberitaan Dahlan Iskan sebagai tersangka di *Jawa Pos*.

#### 1. Analisis Tekstual (Analisis Mikro)

##### a. Struktur Teks

Secara umum teks berita di *Jawa Pos* terkait penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik dalam penelitian ini, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup.

##### 1) Bagian Pembuka Berita

Sebuah judul berita dapat memberikan gambaran isi dari keseluruhan berita. Selain itu, judul juga dapat menggambarkan cara pandang dan keberpihakkan media terhadap berita yang diturunkan. Pilihan kata yang digunakan dalam judul tentunya sangat mempengaruhi makna yang disampaikan kepada pembaca. Selain itu, pilihan judul juga dapat menggiring opini pembaca. Tidak banyak berita yang diturunkan *Jawa Pos* mengenai Dahlan Iskan sebagai tersangka

kasus Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik. Berikut ini judul-judul pemberitaan di *Jawa Pos* terkait status Dahlan Iskan sebagai tersangka.

- 1) 'Dahlan: Saya Ambil Tanggung Jawab Ini';
- 2) 'Mobil Listrik APEC Pakai Dana Sponsorship BUMN';
- 3) 'Penjelasan Dahlan kepada Kejagung Kontrak Gardu Induk Diteken setelah Dahlan Bukan KPA';
- 4) 'Cegah Kriminalisasi Pejabat, Presiden Lindungi Penanggung Jawab Proyek'.

Sehari setelah Dahlan Iskan pertama kali ditetapkan sebagai tersangka, *Jawa Pos* menurunkan berita berjudul 'Dahlan: Saya Ambil Tanggung Jawab Ini'. Pilihan judul tersebut mengesankan makna bahwa Dahlan Iskan sebenarnya tidak bersalah. Justru kesalahan tersebut diasumsikan dilakukan para mantan bawahannya saat menjabat sebagai Dirut PLN. Meskipun demikian, Dahlan Iskan bersikap kesatria, berani dan mau mengambil tanggung jawab bawahannya tersebut. Dahlan Iskan berani berkorban demi mantan anak buahnya.

Pilihan judul tersebut sangat berbeda dengan media-media lain yang menurunkan berita yang sama sehari setelah penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Sedangkan koran *Tempo* menampilkan *headline* terkait dengan berita yang sama dengan judul, 'Dahlan Iskan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Gardu Induk'. Dalam koran *Kompas* (*Kompas*, 2015) menurunkan berita dengan judul 'Dahlan Iskan Tersangka Korupsi Pembangunan Gardu Induk'. Perbedaan judul tersebut menggambarkan perbedaan cara pandang media dalam kasus yang membelit Dahlan Iskan.

Pada berita lainnya, *Jawa Pos* menuliskan judul 'Mobil Listrik APEC Pakai Dana Sponsorship BUMN'. Penggunaan judul tersebut sekaligus memberikan klarifikasi bahwa dalam proyek mobil listrik APEC menggunakan dana *sponsorship* BUMN. Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan tidak tergolong kerugian negara. Selanjutnya, pada judul yang lain *Jawa Pos*

menuliskan judul 'Penjelasan Dahlan kepada Kejagung Kontrak Gardu Induk Diteken setelah Dahlan Bukan KPA' memberikan penguatan atas pernyataan Dahlan Iskan bahwa kontrak gardu induk diteken setelah Dahlan Iskan bukan lagi Kuasa Penggunaan Anggaran.

Dalam berita lain terkait penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka, *Jawa Pos* menurunkan judul, 'Cegah Kriminalisasi Pejabat, Presiden Lindungi Penanggung Jawab Proyek'. Melalui judul tersebut *Jawa Pos* menguatkan bahwa penetapan tersangka Dahlan Iskan sebagai tersangka membuat para pejabat cenderung lamban dalam memutuskan sebuah proyek. Kebijakan yang diambil Presiden untuk melindungi para pejabat merupakan pelajaran dari penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka. *Jawa Pos* menyiratkan bahwa Presiden Jokowi mengambil pelajaran atas penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Penetapan tersebut menurut *Jawa Pos* merupakan sebuah upaya kriminalisasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat dipahami bahwa *Jawa Pos* menggunakan pemilihan judul yang tidak menyudutkan Dahlan Iskan sebagai seorang tersangka. Dahlan Iskan tidak ditempatkan sebagai seorang tersangka. Dahlan Iskan lebih ditempatkan sebagai orang yang berani mengambil tanggung jawab atas kesalahan mantan anak buahnya. Selain itu, judul yang digunakan cenderung mencari sudut pembelaan untuk Dahlan Iskan. Judul lebih banyak menggunakan sudut positif seorang Dahlan Iskan. Hal itu sedikit banyak mempengaruhi pembaca bahwa Dahlan Iskan tidak bersalah.

## 2) Pemaparan Isi Berita dari Sudut Pandang Dahlan Iskan

Penggunaan judul-judul di *Jawa Pos* tersebut didukung substansi berita yang tidak sebatas menyampaikan, namun disertai argumentasi. Argumentasi yang disampaikan berisi pembelaan dari sudut pandang diri Dahlan Iskan. Berikut ini argumentasi dalam berita berjudul 'Dahlan: Saya Ambil Tanggung Jawab Ini'.

5) Dalam proyek gardu induk tersebut, Dahlan memang menjadi KPA. Namun, kewenangan itu tidak diembannya hingga proyek tersebut tuntas. Sebab, pada 2011, Dahlan tidak lagi menjabat Dirut PLN karena diangkat menjadi menteri BUMN. Nah, posisi KPA lantas dijabat Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno. Namun, hingga kini Waryono belum dimintai pertanggungjawaban seperti halnya Dahlan. Waryono yang kini berstatus terdakwa korupsi ESDM di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya pernah diperiksa sebagai saksi untuk kasus gardu induk PLN. Selain Dahlan, proyek gardu induk tersebut telah menyeret 15 orang sebagai tersangka. Dua di antara mereka adalah pejabat pembuat komitmen (PPK). (**Dahlan: Saya Ambil Tanggung Jawab Ini**).

Pada kutipan berita tersebut, *Jawa Pos* memberikan argumentasi, dalam proyek gardu induk PLN, Dahlan Iskan memang menjadi KPA. Namun, kewenangan itu tidak diemban Dahlan Iskan lagi sampai proyek tersebut tuntas. Pada 2011, Dahlan tidak lagi menjabat Dirut PLN karena diangkat menjadi menteri BUMN. Posisi KPA kemudian dijabat Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno.

*Jawa Pos* sekaligus memberikan argumentasi yang menguatkan bahwa pihak yang sebenarnya harus bertanggung jawab adalah Waryono Karno. Sedangkan, hingga kini Waryono belum juga dimintai pertanggungjawaban seperti halnya Dahlan Iskan. Waryono telah berstatus terdakwa korupsi ESDM di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya pernah diperiksa sebagai saksi untuk kasus gardu induk PLN.

### 3) Penutup Menggunakan argumentatif untuk menetralkan isu-isu negatif dengan Kalimat Positif

Pada bagian akhir berita lebih banyak mengulas diri Dahlan Iskan dengan menyampaikan argumentasi seperti berikut ini.

6) Terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka, berikut penjelasan Dahlan Iskan, "Penetapan saya sebagai tersangka ini saya terima dengan penuh tanggung jawab. Setelah ini, saya akan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek-proyek gardu induk tersebut karena sudah lebih dari tiga tahun saya tidak mengikuti perkembangannya. Saya ambil tanggung jawab ini karena sebagai KPA saya memang harus bertanggung jawab atas semua proyek itu. Termasuk apa pun yang dilakukan anak buah. Semua KPA harus menandatangani surat pernyataan seperti itu dan kini saya harus ambil tanggung jawab itu. Saya juga banyak ditanya soal usulan-usulan saya untuk menerobos peraturan-peraturan yang berlaku. Saya jawab bahwa itu karena saya ingin semua proyek bisa berjalan. Saya kemukakan kepada pemeriksa bahwa saya tidak tahan menghadapi keluhan rakyat atas kondisi listrik saat itu. Bahkan, beberapa kali saya mengemukakan bahwa saya siap masuk penjara karena itu. Kini, ternyata saya benar-benar jadi tersangka. Saya harus menerimanya. Hanya, saya harus minta maaf kepada istri saya yang dulu melarang keras saya menerima penugasan menjadi Dirut PLN karena hidup kami sudah lebih dari cukup. (**Dahlan: Saya Ambil Tanggung Jawab Ini**).

Penggalan artikel tersebut memberikan kesan positif kepada Dahlan Iskan karena mengambil tanggung jawab yang seharusnya ditanggung mantan bawahannya. Dahlan Iskan merasa bertanggung jawab atas semua proyek tersebut. Dahlan Iskan siap mengambil risiko atas kesalahan yang dilakukan mantan bawahannya. Dahlan Iskan sebagai KPA harus menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban dan kini Dahlan Iskan harus mengambil tanggung jawab tersebut.

*Jawa Pos* dalam berita tersebut juga mengungkapkan berbagai terobosan atas

peraturan-peraturan yang dilakukan Dahlan Iskan agar semua proyek bisa berjalan. Tindakan yang dilakukan Dahlan Iskan dilatarbelakangi keluhan rakyat atas kondisi listrik saat itu. Bahkan, beberapa kali Dahlan Iskan mengemukakan siap masuk penjara atas tindakannya tersebut. Kini, ternyata Dahlan Iskan benar-benar jadi tersangka. Dahlan Iskan digambarkan berlapang dada.

Hanya saja, Dahlan Iskan meminta maaf kepada istri yang dulu melarang keras menerima penugasan menjadi Dirut PLN karena hidup kami sudah lebih dari cukup. *Jawa Pos* ingin menegaskan bahwa Dahlan Iskan dengan kondisi ekonomi sudah cukup, tidak perlu lagi korupsi dan Dahlan Iskan tidak mungkin melakukan korupsi. Penetapan Dahlan Iskan sebagai bentuk pengorbanan besar Dahlan Iskan untuk kepentingan rakyat. Dahlan Iskan rela menderita demi kepetingan rakyat.

#### **b. Penggunaan Gramatika Transitif**

Dalam bagian tata bahasa menurut Fairclough dalam Yusep Ahmadi F., 2014: 257), ada tiga aspek yang bisa dianalisis, yakni ketransitifan, tema, dan modalitas. Ketransitifan berkenaan dengan fungsi ideasional bahasa, tema berkenaan dengan fungsi tekstual bahasa, dan modalitas berkenaan dengan fungsi interpersonal bahasa (Eriyanto dalam Yusep Ahmadi F., 2014: 257).

Gramatika yang berupa transitivitas, *Jawa Pos* menggunakan strategi dengan menguatkan hal positif dan mengurangi hal negatif dari diri Dahlan Iskan. Dalam berita berjudul 'Dahlan: Saya Ambil Tanggung Jawab Ini' *Jawa Pos* menetralkan berita penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka dengan mengambil tanggapan Ketua DPR, Fahri Hamzah, menanggapi penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka.

7) Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, dalam kasus tersebut, Dahlan menjadi korban Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurut dia, konstruksi UU Tipikor saat itu dibuat dengan emosi atau kemarahan akan maraknya praktik korupsi. Dengan

*kondisi saat ini, semua orang berpotensi menjadi tersangka. ... Dia memandang, kasus yang dialami Dahlan murni disebabkan terobosannya saat menjabat Dirut PLN. Terobosan Dahlan yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme telah menjeratnya sebagai tersangka. "Saya anggap, dugaan memperkaya orang lain itu karena banyak pengadaan waktu itu untuk melakukan percepatan," ujarnya. (Dahlan: Saya Ambil Tanggung Jawab Ini).*

Dalam berita tersebut *Jawa Pos* memuat pendapat Fahri Hamzah atas penetapan tersangka tersebut karena konstruksi UU Tipikor saat itu dibuat dengan emosi atau kemarahan akan maraknya praktik korupsi. Dengan kondisi saat ini, semua orang berpotensi menjadi tersangka. Fahri Hamzah memandang kasus yang dialami Dahlan murni disebabkan terobosannya saat menjabat Dirut PLN. Terobosan Dahlan yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme telah menjeratnya sebagai tersangka. Pencitraan positif atas penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka dengan mengutip pendapat juga dilakukan atas pendapat mantan orang dekat Dahlan Iskan, Said Didu, berikut ini.

8) Di tempat terpisah, bekas Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mengatakan, penilaian adanya kerugian negara akibat penggunaan dana promosi tidaklah tepat. Sebab, anggaran itu habis pakai dan berbeda dengan dana CSR atau program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). "Buat bayar artis atau SPG saja boleh," katanya. Said mengatakan, uang sponsorship perusahaan itu berstatus uang korporasi. "Yang dilupakan penegak hukum, UU BUMN menyebut negara secara sadar memisahkan asetnya ke BUMN untuk dikelola secara korporasi," terangnya. Jadi, tidak mengikuti mekanisme yang sama dengan APBN. Dia berharap penegak hukum bisa memahami tiga jenis pengeluaran BUMN

*tersebut. (Mobil Listrik APEC Pakai Dana Sponsorship BUMN, Penjelasan Dahlan kepada Kejagung).*

Dalam berita tersebut Said Didu memaparkan bahwa penilaian adanya kerugian negara akibat penggunaan dana promosi tidaklah tepat. Anggaran itu habis pakai dan berbeda dengan dana CSR atau program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Uang *sponsorship* perusahaan itu berstatus uang korporasi. Bagi Said Didu penegak hukum melupakan bahwa UU BUMN menyebut negara secara sadar memisahkan asetnya ke BUMN untuk dikelola secara korporasi. Jadi, tidak mengikuti mekanisme yang sama dengan APBN. Dengan penjelasan tersebut *Jawa Pos* ingin membangun citra bahwa terobosan Dahlan Iskan sudah sesuai aturan dan tidak bisa dipidanakan.

Gramatika yang berupa kalimat positif-negatif, *Jawa Pos* menggunakan porsi kalimat positif yang sangat besar untuk Dahlan Iskan

10) *Dahlan menjabat KPA proyek gardu induk pada 1 Januari 2010–26 Oktober 2011. Sementara itu, persetujuan proyek gardu induk secara multiyear keluar setelah kurun waktu tersebut. Keluarnya keputusan itu juga dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 194 tanggal 1 Desember 2011. Sementara itu, kontrak proyek ditandatangani pada medio Desember 2011. Pembayaran material on site yang juga dipermasalahkan penyidik kejaksa terjadi pada Desember 2012 (Kontrak Gardu Induk Diteken setelah Dahlan Bukan KPA).*

Kalimat-kalimat positif *Jawa Pos* terkait Dahlan Iskan berisi klarifikasi mengenai kronologi keputusan-keputusan dan terobosan-terobosan Dahlan Iskan. Sedangkan, gramatika yang berupa modalitas, *Jawa Pos* menggunakan modalitas berupa modalisasi-kemungkinan untuk menunjukkan komitmen dan realisasi semua tanggung jawab Dahlan Iskan.

11) *Presiden SBY kala itu juga mendorong berbagai pihak agar Indonesia bisa*

*pamer mobil listrik saat penyelenggaraan KTT APEC di Bali, Oktober 2013. Ide tersebut ditindaklanjuti Dahlan dengan menggelar rapat staf. Rapat itu membahas cara pengadaan mobil listrik yang tak melanggar aturan. Akhirnya, muncul ide anggaran diambilkan dari dana sponsorships perusahaan BUMN. "Bukan dana corporate social responsibility (CSR) seperti yang disebutkan selama ini," kata Yusril. Dana sponsorship BUMN digunakan karena pengadaan tersebut tak dianggarkan dalam APBN. "Sampai di situ saja peran Pak Dahlan. Tak ada lainnya," tegas Yusril (Mobil Listrik APEC Pakai Dana Sponsorship BUMN, Penjelasan Dahlan kepada Kejagung).*

Dalam petikan berita tersebut *Jawa Pos* menguraikan tentang putusan Dahlan Iskan terkait Mobil Listrik sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Menteri BUMN. Selain itu, putusan Dahlan Iskan tersebut merupakan pelaksanaan atas arahan Presiden SBY saat penyelenggaraan KTT APEC di Bali, Oktober 2013.

### c. Penggunaan Kosakata

Pemberitaan di *Jawa Pos* terkait penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik memiliki kekhasan dalam penggunaan kosakata. Pertama, *Jawa Pos* memanfaatkan kosakata eksperiensial untuk mengangkat hal-hal yang baik mengenai pribadi Dahlan Iskan dan pertimbangan Dahlan Iskan pada saat mbilan kebijakan Gardu Induk PLN dan Mobil listrik, dan dukungan masyarakat pada Dahlan Iskan. Pencitraan positif juga dilakukan *Jawa Pos* dengan memberitakan di luar konteks berita utama, seperti pada berita berjudul 'Kontrak Gardu Induk Diteken setelah Dahlan Bukan KPA' berikut ini.

9) *Dahlan kemarin tampak santai menjalani pemeriksaan. Bahkan, dia sempat membawa buku sebagai bacaan. Sepintas buku ber-cover cokelat itu terlihat berjudul People of the Book.*

Saat hendak menuju mobilnya untuk pulang, Dahlan sempat dihampiri seorang ibu berkerudung. Perempuan yang mengaku dari Banten itu menyerahkan mawar sambil menangis. "Saya pengagum beliau. Saya tidak yakin beliau korupsi," ungkap ibu itu. (**Kontrak Gardu Induk Diteken setelah Dahlan Bukan KPA**).

Dalam berita tersebut, *Jawa Pos* menyuguhkan penutup berita dengan memotret sisi pribadi Dahlan Iskan tampak santai menjalani pemeriksaan. Selain itu, *Jawa Pos* juga menyampaikan bahwa Dahlan Iskan sempat membawa buku sebagai bacaan. Sepintas buku bersampul coklat itu terlihat berjudul *People of the Book*. Selan itu, untuk menunjukkan bahwa masyarakat bersimpati atas kasus yang menimpa Dahlan Iskan, *Jawa Pos* menyampaikan saat hendak menuju mobilnya untuk pulang, Dahlan sempat dihampiri seorang ibu berkerudung. Perempuan yang mengaku dari Banten itu menyerahkan mawar sambil menangis. 'Ibu tersebut termasuk pengagum Dahlan Iskan dan menyakini Dahlan Iskan tidak korupsi.

Kedua, *Jawa Pos* juga memanfaatkan kata attitudinal untuk memberikan penilaian yang baik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Dahlan Iskan. pemaparan berita di *Jawa Pos* mengenai Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus korupsi gardu induk PLN dan mobil listrik lebih banyak menggunakan sudut pandang Dahlan Iskan. Hal tersebut dapat terlihat pada semua berita yang diturunkan terkait kasus yang melibatkan Dahlan Iskan berikut ini.

12) *Proyek pembangunan gardu induk untuk mengatasi krisis listrik di Indonesia malah mengakibatkan Dahlan Iskan menjadi tersangka. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan mantan Dirut PLN itu sebagai tersangka karena dianggap menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara dalam proyek-proyek tersebut (Dahlan: Saya Ambil Tanggung Jawab Ini).*

13) *Pertimbangan penetapan tersangka dimasukkan sebagai objek praperadilan, KUHP dinilai tidak memiliki check and balance system. Selama ini, tidak ada mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dalam penetapan seseorang sebagai tersangka. Padahal, dalam penetapan tersangka, tidak tertutup kemungkinan terjadi tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang bisa dikategorikan perampasan hak asasi seseorang (Persoalkan Status Tersangka, Dahlan Ajukan Praperadilan).*

14) *Sebagai informasi, poin penting yang akan masuk inpres tersebut, antara lain, adanya proses penunjukan langsung kepada salah satu perusahaan BUMN tanpa harus menunggu perpres terlebih dahulu. Sebab, proses perpres bisa memakan waktu lama, yakni berbulan-bulan. Seperti diberitakan, penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka oleh Kejati DKI Jakarta selaku KPA memunculkan efek domino. Menteri ESDM Sudirman Said yang saat ini dibebani realisasi pembangkit listrik 35 ribu mw ikut waswas. Sebab, dia juga memberikan berbagai terobosan (Cegah Kriminalisasi Pejabat, Presiden Lindungi Penanggung Jawab Proyek).*

Pemaparan berita-berita tersebut, lebih banyak menyajikan dari sudut pandang Dahlan Iskan. Berbagai pemaparan kasus tersebut dijelaskan berdasarkan versi Dahlan Iskan. Berita tanpa melakukan 'cross check' dengan sumber berita. Hal itu tentunya mempengaruhi persepsi pembaca *Jawa Pos*.

Ketiga, *Jawa Pos* memanfaatkan metafora untuk mengungkap hal-hal yang positif dan sekaligus menetralkan hal-hal yang negatif dari kasus Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik. Selanjutnya pada berita 'Persoalkan Status Tersangka, Dahlan Ajukan Praperadilan' *Jawa Pos* menyertakan argumentasi sebagai berikut.

15) *'Jadi, kami ingin tahu apakah alat bukti yang dimiliki kejati itu didapat melalui*

satu proses penyidikan (*pro-justitia*) atau masih mencari tahu tentang sesuatu,” lanjut mantan menteri sekretaris negara itu. Dahlan Iskan memang ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek pembangunan gardu induk PLN. Proyek itu dilakukan untuk mengatasi krisis listrik di Indonesia. Saat proyek berjalan, Dahlan sudah tidak menjabat Dirut PLN. **(Persoalkan Status Tersangka, Dahlan Ajukan Praperadilan).**

Pada petikan artikel tersebut terdapat ulasan berupa argumentasi bahwa Dahlan Iskan memang ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek pembangunan gardu induk PLN. *Jawa Pos* memberikan penekanan bahwa proyek tersebut dilakukan untuk mengatasi krisis listrik di Indonesia. Selain itu, *Jawa Pos* menguatkan bahwa Dahlan Iskan tidak terlibat karena saat proyek berjalan, Dahlan sudah tidak menjabat lagi sebagai Dirut PLN. Dengan demikian, *Jawa Pos* mengungkapkan bahwa kasus tersebut sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Dahlan Iskan.

**16) Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Agar lancar dan tidak muncul ketakutan akan adanya kriminalisasi, Presiden Jokowi memberikan perhatian terhadap para pejabat yang bertindak sebagai pengguna anggaran (PA) ataupun kuasa pengguna anggaran (KPA). Dua posisi tersebut rawan diperkarakan apabila terjadi kesalahan prosedur di beberapa titik kebijakan. .... Seperti diberitakan, penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka oleh Kejati DKI Jakarta selaku KPA memunculkan efek domino. Menteri ESDM Sudirman Said yang saat ini dibebani realisasi pembangkit listrik 35 ribu mw ikut waswas. Sebab, dia juga memberikan berbagai terobosan. "Akan berusaha mencari payung hukum dan komunikasi dengan penegak hukum. Supaya tidak jadi masalah di belakang," tuturnya. **(Cegah Kriminalisasi Pejabat,****

**Presiden Lindungi Penanggung Jawab Proyek).**

Pada berita tersebut dijelaskan bahwa kasus yang menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka oleh Kejati DKI Jakarta selaku KPA memunculkan efek domino. Menteri ESDM Sudirman Said yang saat ini dibebani realisasi pembangkit listrik 35 ribu MW ikut khawatir. Seperti ditulis *Jawa Pos*, Said Didu juga memberikan berbagai terobosan. Dalam pesan berita tersebut, tersembunyi makna bahwa yang dilakukan Dahlan Iskan pada saat itu merupakan sebuah terobosan. Sedangkan terobosan Dahlan Iskan menyebabkan dirinya dikriminalisasi. Penetapan tersangka Dahlan Iskan tidak lebih merupakan upaya kriminalisasi atas terobosan yang dilakukan.

## **2. Dimensi Praktik Wacana**

Analisis teks dilanjutkan pada analisis praktik wacana. Menurut Fairclough (dalam Jorgensn dan Philips dalam Yusep Ahmadi F. 2020: 261). Analisis praktik kewacanaan ini dipusatkan pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi, termasuk di dalamnya menyelidik proses apakah yang dilalui suatu teks sebelum dicetak dan perubahan apa yang dialami sebelum disebarluaskan.

Pemberitaan tentang kasus yang membelit Dahlan Iskan di *Jawa Pos* sangat terpengaruh sosok Dahlan Iskan. Kebesaran *Jawa Pos* tidak dapat dilepaskan dari sosok Dahlan Iskan. *Jawa Pos* (Wikipedia, 2015) adalah surat kabar harian yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. *Jawa Pos* merupakan harian terbesar di Jawa Timur, dan merupakan salah satu harian dengan oplah terbesar di Indonesia. *Jawa Pos* didirikan oleh The Chung Shen pada 1 Juli 1949 dengan nama *Djava-Post*.

Pada akhir tahun 1970-an, omzet *Jawa Pos* mengalami kemerosotan yang tajam. Ketika usianya menginjak 80 tahun, The Chung Shen akhirnya memutuskan untuk menjual *Jawa Pos*. Pada tahun 1982, Eric F.H. Samola, waktu itu adalah Direktur Utama PT Grafiti Pers (penerbit

majalah *Tempo*) mengambil alih *Jawa Pos*. Dengan manajemen baru, Eric mengangkat Dahlan Iskan, yang sebelumnya adalah kepala biro *Tempo* di Surabaya untuk memimpin *Jawa Pos*. Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan *Jawa Pos* yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 eksemplar, dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar.

Lima tahun kemudian terbentuklah *Jawa Pos News Network (JPNN)*, salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia, dimana memiliki lebih dari 80 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia. Setelah sukses mengembangkan media cetak di seluruh Indonesia, pada tahun 2002 *Jawa Pos Grup* mendirikan stasiun televisi lokal JTV di Surabaya, yang kemudian diikuti Batam TV di Batam, Riau TV di Pekanbaru, Fajar TV di Makassar, Palembang TV di Palembang, Parijz van Java TV di Bandung, Radar Cirebon Televisi RCTV di Cirebon Kota Wali.

Keberadaan *Jawa Pos Group* tersebut sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan opini bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Pemberitaan utama *Jawa Pos Group* tetap mengadopsi pemberitaan di *Jawa Pos*. Dengan demikian pola pemberitaan *Jawa Pos* terkait kasus yang membelit Dahlan Iskan akan diikuti oleh jaringan *Jawa Pos Group* di seluruh Indonesia.

### **3. Dimensi Praktik Sosial Budaya (Makro)**

Secara keseluruhan pembahasan tersebut dapat diidentifikasi ideologi yang dibangun *Jawa Pos* dalam Teks Berita terkait penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik. Pertama, *Jawa Pos* membentuk ideologi bahwa Dahlan Iskan tidak bersalah. Hal tersebut terlihat dari pemilihan judul, isi, dan gramatikal maupun kosakata yang digunakan. Kedua, *Jawa Pos* membentuk ideologi bahwa kebijakan yang diambil Dahlan Iskan sebagai sebuah terobosan atas berbagai

persoalan bangsa. Ketiga, *Jawa Pos* membentuk ideologi bahwa kebijakan yang dilakukan Dahlan Iskan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat. Keempat, *Jawa Pos* juga membentuk ideologi bahwa Dahlan Iskan sudah memiliki harta kekayaan sehingga tidak mungkin korupsi. Kelima, *Jawa Pos* membentuk ideologi bahwa kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan anak buah atau mantan anak buah, Keenam, *Jawa Pos* membentuk ideologi bahwa Dahlan Iskan bersikap kesatria mengambil alih tanggung jawab atas kesalahan anak buah sekalipun.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis dalam pembahasan tersebut dapat diambil beberapa simpulan. **Pertama, analisis tekstual (analisis mikro).** Struktur teks pada bagian pembuka berita, menggunakan pilihan judul yang mengesankan makna bahwa Dahlan Iskan sebenarnya tidak bersalah. Penggunaan judul juga sekaligus memberikan klarifikasi kebenaran versi Dahlan Iskan. Pemilihan judul yang tidak menyudutkan Dahlan Iskan sebagai seorang tersangka. Dahlan Iskan tidak ditempatkan sebagai seorang tersangka.

Selanjutnya, pemaparan isi berita dari sudut pandang Dahlan Iskan. Substansi berita yang tidak sebatas menyampaikan, namun disertai argumentasi bahwa Dahlan Iskan tidak bersalah dan menunjuk pihak lain yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Teks penutup berita menggunakan argumentatif untuk menetralkan isu-isu negatif dengan kalimat positif Dahlan Iskan karena mengambil tanggung jawab yang seharusnya ditanggung mantan bawahannya, berbagai terobosan atas peraturan-peraturan yang dilakukan Dahlan Iskan agar semua proyek bisa berjalan. Selain itu, *Jawa Pos* ingin menyampaikan bahwa Dahlan Iskan dengan kondisi ekonomi sudah cukup, tidak perlu lagi korupsi dan Dahlan Iskan tidak mungkin melakukan korupsi. Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka merupakan bentuk pengorbanan besar untuk kepentingan rakyat. Berdasarkan analisis teks *Jawa Pos*

menggunakan gramatika transitif memuat pendapat tokoh nasional sebagai pencitraan positif atas penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka.

Selanjutnya, berdasarkan analisis teks, pemberitaan di *Jawa Pos* terkait penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik memiliki kekhasan dalam penggunaan kosakata. Pertama, *Jawa Pos* memanfaatkan kosakata eksperiensial untuk mengangkat hal-hal yang baik mengenai pribadi Dahlan Iskan, pertimbangan Dahlan Iskan pada saat pengambilan kebijakan, dan dukungan masyarakat pada Dahlan Iskan. Pencitraan positif juga dilakukan *Jawa Pos* dengan memberitakan di luar konteks berita utama. Kedua, *Jawa Pos* juga memanfaatkan kata attitudinal untuk memberikan penilaian yang baik terhadap apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh Dahlan Iskan. Ketiga, *Jawa Pos* memanfaatkan metafora untuk mengungkap hal-hal yang positif dan sekaligus menetralkan hal-hal yang negatif dari kasus Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik.

**Kedua, analisis teks dilanjutkan pada analisis praktik wacana.** Pemberitaan tentang kasus yang membelit Dahlan Iskan di *Jawa Pos* sangat terpengaruh sosok Dahlan Iskan. Kebesaran *Jawa Pos* tidak dapat dilepaskan dari sosok Dahlan Iskan. Keberadaan *Jawa Pos Group* tersebut sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan opini bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Pemberitaan utama *Jawa Pos Group* tetap mengadopsi pemberitaan di *Jawa Pos*. Dengan demikian pola pemberitaan *Jawa Pos* terkait kasus yang membelit Dahlan Iskan akan diikuti oleh jaringan *Jawa Pos Group* di seluruh Indonesia.

**Ketiga, dimensi praktik sosial budaya (makro)** Dibangun *Jawa Pos* secara keseluruhan pembahasan tersebut dapat diidentifikasi ideologi yang dibangun *Jawa Pos* dalam Teks Berita terkait penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus Gardu Induk PLN dan Mobil Listrik. Pertama, *Jawa Pos* membentuk ideologi bahwa Dahlan Iskan tidak bersalah. Hal tersebut terlihat dari

pemilihan judul, isi, dan gramatikal maupun kosakata yang digunakan. Kedua, *Jawa Pos* membentuk ideologi bahwa kebijakan yang diambil Dahlan Iskan sebagai sebuah terobosan atas berbagai persoalan bangsa. Ketiga, *Jawa Pos* membentuk ideologi bahwa kebijakan yang dilakukan Dahlan Iskan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat. Keempat, *Jawa Pos* juga membentuk ideologi bahwa Dahlan Iskan sudah memiliki harta kekayaan sehingga tidak mungkin korupsi. Kelima, *Jawa Pos* membentuk ideologi bahwa kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan anak buah atau mantan anak buah, Keenam, *Jawa Pos* membentuk ideologi bahwa Dahlan Iskan bersikap kesatria mengambil alih tanggung jawab atas kesalahan anak buah sekalipun.

Berdasarkan simpulan tersebut semakin menunjukkan bahwa kekuatan yang di belakang media sedikit banyak berpengaruh terhadap independensi sebuah pemberitaan. Terlebih pemberitaan yang menyangkut pemilik kekuatan media. Oleh karena itu, ke depan, sebuah media harus bisa menjadi milik masyarakat. Memberitakan kepentingan rakyat bukan pemilik kekuasaan maupun kekuatan media.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi F., Yusep. Dkk. 2014. Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wacana Kenaikan Harga BBM 2013 di Buletin Al-Islam yang berjudul "Menaikkan Harga BBM: Nenaikkan Kemiskinan". *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*. 12 (2). 253-265. Bandung: Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
- Budiman, Kris. 2002. "Membaca Mitos Bersama Roland Barthes: Analisis Wacana dengan Pendekatan Semiotik". Kris Budiman (penyunting). *Analisis Wacana dari Linguistik Sampai Dekonstruksi*. Pusat Studi Kebudayaan UGM. Yogyakarta.
- Fauzan, Umar. 2004. Analisis Wacana Kritis Teks Berita Metro TV dan TvOne Mengenai "Luapan Lumpur Sidoarjo.

- <http://pasca.uns.ac.id/?p=3074>. Diakses tanggal 23 Juli 2015.
- Jawa Pos. [https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa\\_Pos](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Pos). Diakses pada tanggal 3 Agustus 2015.
- Jawa Pos. 'Cegah Kriminalisasi Pejabat, Presiden Lindungi Penanggung Jawab Proyek' <http://www.jawapos.com/baca/artikel/18760/cegah-kriminalisasi-pejabat-presiden-lindungi-penanggung-jawab-proyek>. Diakses pada 14 Juli 2015.
- Kompas. 'Dahlan Iskan Tersangka Korupsi Pembangunan Gardu Induk'. 5 Juni 2015. <http://print.kompas.com/baca/2015/06/05/Dahlan-Iskan-Tersangka-Korupsi-Pembangunan-Gardu-I>. Diakses tanggal 23 Juli 2015.
- Jawa Pos. 'Dahlan: Saya Ambil Tanggung Jawab Ini. Sembilan Gardu Induk Masih Dicek, Sudah Jadi Tersangka. Jawa Pos'. <http://www.jawapos.com/baca/artikel/18462/dahlan-saya-ambil-tanggung-jawab-ini>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2015.
- Jawa Pos. 'Kontrak Gardu Induk Diteken setelah Dahlan Bukan KPA Diperiksa 9 Jam, Jawab 79 Pertanyaan'. <http://www.jawapos.com/baca/artikel/19010/kontrak-gardu-induk-diteken-setelah-dahlan-bukan-kpa>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2015.
- Jawa Pos. 'Mobil Listrik APEC Pakai Dana Sponsorship BUMN, Penjelasan Dahlan kepada Kejagung'. <http://www.jawapos.com/baca/artikel/19062/mobil-listrik-apec-pakai-dana-sponsorship-bumn-penjelasan-dahlan-kepada-kejagung>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2015.
- Jawa Pos. 'Persoalkan Status Tersangka, Dahlan Ajukan Praperadilan' <http://www.jawapos.com/baca/artikel/20134/persoalkan-status-tersangka-dahlan-ajukan-praperadilan>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2015.
- Kusno, Ali. 2015. 'Menguji Kedewasaan Media'. *Jawa Pos*. Diakses tanggal 2 Juli 2015.
- Miles, Matthew B. dan A. Micheal Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitaitaif*. (terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purbani, Widyastuti. *Analisis Wacana Kritis dan Analisis Wacana Feminis*. Dibentangkan pada Seminar Metode Penelitian Berbasis Gender di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 30 Mei 2009.
- Sumadiria, AS Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature (Panduan Praktis Jurnalis Profesional)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thornborrow, Joanna. 2006. *Bahasa dan Media*. Linda Thomas dan Shan Wareing. *Bahasa, Masyarakat, & Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.